

## **BAB IV**

### **PERAN MILITER DALAM KEGAGALAN DEMOKRATISASI MESIR**

Mesir sebagai negara sosial demokrasi yang dikepalai oleh seorang Presiden masih seperti Mesir sebelumnya. Jatuhnya kekuasaan Husni Mubarak diharapkan menjadi awal terbentuknya demokrasi yang baik di Mesir. Presiden Mesir yang baru dilantik Muhammad Mursi diharapkan mampu menjalankan amanat rakyat yang telah dipercayakan melalui pemilihan umum yang dimenangkannya. Revolusi Mesir juga bisa menjadi pelajaran bagi Negara-negara lain yang masih memiliki persoalan dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Mencermati proses transisi demokrasi di Mesir hingga saat ini, terdapat beberapa aktor yang berperan penting didalamnya. Selama dua fase transisi politik tersebut, kekuatan politik Mesir terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu *Militer Mesir* muncul sebagai aktor utama dimana ketika mereka memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan transisi pasca Husni Mubarak hingga perannya dalam kudeta militer terhadap Muhammad Mursi dan sekaligus menempatkan Adly Mansour sebagai presiden sementara Mesir. Selanjutnya, *Ikhwanul Muslimin* yang memegang kekuasaan setelah fase awal transisi selesai; loyalis era Mubarak masih banyak menempati jabatan-jabatan penting.

Perjuangan bangsa Mesir untuk mendapatkan kehidupan demokrasi merupakan perjuangan panjang yang melelahkan. Setelah ribuan tahun dipimpin oleh raja dan presiden yang diktator sampai pada akhirnya mereka bisa memilih presiden mereka sendiri. Presiden pertama dari kalangan sipil yang terpilih secara sah menurut undang-undang dan aturan negara demokrasi yaitu Dr. Muhammad Mursi.

Namun akhirnya perjuangan tersebut harus diulang kembali dari nol. Itu artinya Mesir berjalan mundur dan mencoba mengulangi dari langkah pertama. Langkah yang sama ketika mereka membangun negara demokrasi pasca

runtuhnya rezim Mubarak. Tahun 2011-2013 adalah ujian yang sangat berat bagi Mesir menuju negara berdaulat dari masa kelam menuju masa depan gilang gemilang. Masa kehidupan demokrasi yang bebas dari tekanan militer dan intervensi asing.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan demokratisasi di Mesir mengalami kegagalan.

#### **A. Faktor Internal Keterlibatan Militer dalam Politik Mesir**

Pada 3 Juli malam, militer Mesir menyatakan berakhirnya kepemimpinan Husni Mubarak sebagai presiden. Pada pernyataan yang sama, militer mengumumkan bahwa konstitusi ditangguhkan, pemilihan presiden akan dilangsungkan segera, dan pimpinan mahkamah konstitusi Adly Mansour diangkat menjadi kepala pemerintahan, dan pemerintah transisi akan dibentuk hingga dilangsungkannya pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilu di Mesir merupakan bentuk pemenuhan janji yang telah diberikan oleh militer yang memegang kekuasaan sementara. Pemilu diikuti lebih dari 40 partai dan sebanyak 590 kandidat dari partai serta 6.591 kandidat independen yang memperebutkan sebanyak 489 kursi.

Komisi pemilihan umum Mesir, Minggu 24 Juni 2012, menyatakan, Mursi dari Ikhwanul Muslimin menang dengan 51,7 persen dukungan dengan total peroleh 13.230.131 suara. Mursi mengalahkan Shafiq, mantan Perdana Menteri Mesir di era Mubarak, yang memperoleh suara 48,3 persen atau 12.347.380 suara. Jumlah tersebut hanya separuh dari jumlah pemilik hak suara yang diperkirakan mencapai 50 juta suara. Mursi kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua FJP setelah kemenangan yang diraihnya. (Kompas.com, 2012)

Muhammad Mursi presiden Mesir yang kelima di negara mesir. Tetapi presiden kelima tersebut adalah salah

satu presiden yang terpilih secara demokrasi yang dilakukan oleh Mesir, bagaimana tidak setelah revolusi Mesir yang terjadi semua masyarakat menginginkan atau membentuk negara yang demokrasi.

Militer yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu tersebut. militer mengeluarkan pernyataan bahwa menunda pengumuman hasil pemilu tersebut yang mengakibatkan masyarakat Mesir berfikir adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh pihak militer dengan menundanya pengumuman hasil pemilu tersebut atau pihak militer memiliki rencana untuk memperpanjang kekuasaanya. (UMM, 2013). Masyarakat Mesir banyak yang mempredisikan partai yang berbasis islam yaitu Ikhwanul Muslimin menang dalam pemilu tersebut. sikap militer yang menunda hasil pemilu tersebut menuai protes hingga berujung pada kekerasan dan penindasan.

Peran militer dapat dilihat dari awal sejarahnya revolusi Mesir. Peran militer pasca terpilihnya presiden Mesir yaitu Muhammad Mursi yang terpilih secara demokrasi. Kepimpinan Muhammad Mursi tidak berlanjut baik karena mendapatkan tekanan yang besar saat Mursi memberhentikan anggota parlemen lama yang didominasi kaum militer dan digantikan oleh anggota baru yang didominasi oleh kalangan Ikhwanul Muslimin.

Belum stabilnya dari berbagai aspek di negara Mesir pasca revolusi, pada tanggal 22 November 2012 Mursi mengeluarkan dekrit presiden yang menyatakan Mursi mempunyai otoritas tertinggi, final, dan tidak dapat diganggu gugat. Dekrit tersebut memberikan perlindungan hukum bagi parlemen, dan perlindungan bagi para politisi yang duduk di majelis tinggi. (Kawilarang, 2012) Mursi melalui dekritnya telah menempatkan dirinya di atas hukum, sedangkan semangat demokrasi adalah berdasarkan kepada gagasan keseimbangan kekuasaan. Dekrit presiden tersebut merupakan permasalahan bagi semua orang, bahwa Mursi ingin membangun kekuasaan

otoriter dan mengarahkan syariat islam dengan meningkatkan popularitas golongannya yaitu Ikhwanul Muslimin. Dengan hal tersebut menimbulkan pihak masyarakat Mesir turun jalan melakukan demo untuk menyuarakan pendapatna. Kebanyakan demonstran berasal dari pihak oposisi.

Militer Mesir memiliki posisi yang kuat dan peran penting itu dikarenakan suasana semakin runyam di negara Mesir setelah Kepala SCAF, Abdel Fattah Al Sisi mengultimatum presiden Mursi selama 48 jam agar menyelesaikan krisis politik di Mesir yang merupakan tuntutan masyarakat yang harus segera dipenuhi. (BBC, 2013) Abdel Fattah Al Sisi ini merupakan salah satu tokoh loyalis Mubarak yang mendapatkan kepercayaan Mursi. Mursi tidak menyangka, Al Sisi yang telah diangkat menjadi Kepala SCAF menggantikan Mohamed Hussein Tantawi justru mengambil langkah penggulingan kekuasaan terhadap dirinya setelah menolak diultimatum. Dengan mengeluarkan ultimatum selama 48 jam, militer dapat memberikan tekanan besar bahwa apabila Mursi tidak memenuhi tuntutan rakyat yaitu mengembalikan perekonomian Mesir dan mencabut dekrit yang dikeluarkan Mursi, militer akan memberhentikan Mursi dari kursi presiden atas dasar kepentingan rakyat. Sikap yang di tunjukan oleh militer yang membuat susana negara semakin sulit dengan mengeluarkan kecaman pada presiden untuk mundur padahal dalam konstitusi yang ada di dalam negara tersebut dimana pemimpin angkatan senjata tertinggi adalah presiden. Tetapi kita dapat lihat dari hal ini bahwa militer masih memposisikan dirinya seperti pemerintahan sementara. Sikap militer tersebut menuai protes dari pihak yang mendukung Mursi. Pihak yang mendukung Mursi pun turut turun ke jalan untuk menyuarakan untuk melawan pemerintahan militer.

Militer pada saat melakukan kudeta pada presiden tidak berjalan mulus Militer salah satu yang sangat berpengaruh di Mesir yang melakukan kudeta terhadap

presiden Mursi yang memiliki dampak pada makin banyak korban jiwa yang jadi korban, dikarekan pihak militer harus juga menghadapi pihak yang berasal dari pendukung Mursi. Terjadinya konflik besar karena adanya demonstran yang turun di jalan untuk mendukung Mursi. Pihak militer merespon demonstran yang turun ke jalan dengan cara kekerasan. Konflik yang terjadi di negara Mesir yang melibatkan antara warga sipil yaitu pendukung Mursi dengan pihak militer sangat menggambarkan bagaimana tidak berjalannya sebagai *state apparatus* dan warga sipil menjadi korban seharusnya militer yang melindungi dan menjaga keamanan berbanding terbalik dari apa yang harus di lakukan oleh pihak militer apalagi sampai menggunakan senjata yang seharusnya tidak di gunakan.

Militer memilih cara untuk menggunakan senjata untuk membubarkan demonstrasi yang ada. Karena merasa terganggu kepentingan kelompoknya, penggunaan cara kekerasan bukan hal yang tak biasa dilakukan oleh militer.

## **B. Faktor Eksternal Adanya Intervensi Militer yang didukung Amerika Serikat**

Sebelum militer menguasai pemerintahan Mesir sejak era Gamal Abdel Nasser, pemerintahan Mesir berkiblat ke Inggris. Melalui kudeta militer dengan dibantu Amerika Serikat, militer Mesir menggulingkan Raja Farouk I. Mulailah era Amerika Serikat di Bumi Mesir. (Media Umat, 2013)

Posisi Mesir memang sangat strategis bagi Amerika Serikat. Melalui Mesir, semua pergerakan pasukan Amerika Serikat di berbagai kawasan menjadi mudah. Baik melalui jalur laut, yaitu Terusan Suez maupun lewat zona udaranya. (Sharp, 2017) Selain kepemilikan atas Terusan Suez dan potensi pasar yang besar, Mesir merupakan mitra utama Amerika Serikat dalam berbagai tujuan perdamaian dan stabilitas di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara dan sekitarnya.

Ketundukan militer Mesir kepada Amerika Serikat inilah yang menyebabkan mereka tak segan-segan membangun infrastruktur militer Mesir. Dari segi kuantitas, saat ini tentara Mesir menduduki peringkat ketujuh terbesar di dunia, dan paling besar di Afrika. Bahkan di kawasan Timur Tengah, kekuatannya terbesar setelah Israel. Jumlah tentaranya mencapai angka 1,1 juta orang, ada juga yang menyebut 1,4 juta orang. Pasukan Mesir memiliki sekitar lima ribu wagon panser berlapis baja. Militer pun memiliki persenjataan penangkis serangan udara. Peralatan itu seperti "Stinger" dan "Grad" buatan Amerika Serikat. Berkat pasokan senjata AS dan pembicaraan khusus di Kairo, kapal-kapal perang AS diutamakan untuk melewati Terusan Suez. Dan jet tempur AS boleh setiap saat melintasi wilayah udara Mesir. (Permadi, 2011)

Selain keterlibatan pihak militer dan oposisi terdapat beberapa fakta dari sejumlah pihak seperti dari Program Pelaporan Investigasi di UC Berkeley (*University California of Berkeley*), yang menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pihak asing dalam penggulingan Morsi, yaitu Amerika Serikat. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya puluhan dokumen pemerintah federal Amerika Serikat. Dalam puluhan dokumen tersebut menunjukkan, bahwa pihak Washington secara diam-diam juga mendanai tokoh-tokoh oposisi Morsi, seperti polisi dipengasingan, politisi oposisi, dan politisi anti-Islam, yang disalurkan oleh lembaga-lembaga Amerika Serikat. (Mekay, 2013) Kemudian dikuatkan dengan adanya percakapan senator Amerika Serikat, Mark Kirk yang berbicara di lantai Senat, pada malam putaran kedua pemilihan parlemen Mesir dengan tema "Upaya AS mengatasi bahaya dalam menghadapi dominasi Islam yang meningkat dalam politik Mesir" pada tanggal 13 Desember 2011. Hal tersebut dilakukan setelah melihat adanya tren positif terhadap kenaikan kelompok-kelompok

Islamis termasuk kelompok Ikhwanul Muslimin dalam pemilu Mesir. (BBC, 2012)

Barrack Obama sebelum terjadinya kudeta pada 1 Juli 2013 menyatakan, “Komitmen Amerika Serikat ke Mesir bukan kepada individu-individu atau partai. Komitmen Amerika Serikat, yaitu pada proses. Amerika Serikat mendukung pemerintahan yang demokratis. Tetapi demokrasi itu bukan sekedar menang pemilu, namun juga bagaimana pemenang pemilu bisa bekerjasama dengan kelompok oposisi”. (Waskito, 2013, p. 16) Melihat pernyataan tersebut, Amerika Serikat mendukung proses terjadinya kudeta yang disuarakan oleh kelompok oposisi.

Dalam prosesnya penggulingan rezim Mursi, keadaan yang rentan akan konflik memudahkan militer masuk kedalamnya, begitu juga karena kepentingan kelompok dan Amerika Serikat yang memberi dukungan politik karena posisinya sebagai Negara *Super Power*. Kekhawatiran muncul sejak terpilihnya Mohamed Morsi sebagai Presiden Mesir. Kekhawatiran tersebut muncul karena latar belakang Mohamed Morsi yang berasal dari Ikhwanul Muslimin. Amerika Serikat menganggap kelompok Islam dapat mengancam kepentingannya di Mesir. Menurutnya, ketika Mohamed Morsi memimpin Mesir, Ikhwanul Muslimin dapat mempengaruhi kebijakan internal dan eksternal Mesir.

Kemudian selain itu juga, Amerika Serikat memberikan dukungan ekonomi atau bantuan dana kepada pihak-pihak oposisi dan militer untuk melancarkan aksi penggulingan Mohamed Morsi. Pihak oposisi dan militer yang memiliki peran dalam membuat kekacauan dalam pemerintahan Morsi dan Ikhwanul Muslimin. Amerika Serikat melanjutkan bantuan luar negerinya terhadap militer Mesir sebesar \$1,3 miliar per tahun yang secara tidak langsung menjadikan militer Mesir sebagai alat oleh Amerika Serikat untuk terlibat dalam penggulingan Morsi. (BBC, 2013) Amerika juga akan mengirimkan pesawat tempur F-16 yang merupakan perjanjian persenjataan

dengan Mesir dan telah disepakati pada tahun 2010 untuk memasok 20 jet tempur. (Waskito, 2013)

Kondisi sosial politik Mesir yang mengalami pasang surut, menunjukkan bahwa keadaan pemerintahan di Mesir belum berjalan secara efektif, maka dari melemahnya konstitusi merupakan hal yang mendasari terjadinya intervensi militer.